

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(SUATU STUDI DI DESA WAYAFLI KECAMATAN MABA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)**

Oleh

Fandayani Kapita¹

Johannis Eduard Kaawoan²

Johny P. Lengkong³

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik.

Sebagai seorang pemimpin, kepala desa diberikan tugas untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desanya, proses pemberdayaan dapat dilakukan banyak hal dan sumber pendanaannya telah diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa Wayafli dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Peran Kepala Desa Wayafli dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sudah baik terlihat dari beberapa program pemberdayaan yang ada di desa yaitu pemberdayaan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur: saluran air, jalan setapak, pemberian bantuan alat-alat penangkap ikan nelayan, sedangkan pemberdayaan secara non fisik meliputi penyuluhan-penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Kata Kunci : Peranan, Kepala Desa, Pemberdayaan

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat

² Ketua Penguji/ Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/ Pembimbing Skripsi

PENDAHULUAN

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yang di tetapkan dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara. Perkembangan ini di tandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah *good governance* atau juga sering di artikan secara umum sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal - usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa. Pembangunan desa selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan desa bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar desa sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagaimana yang tela di jelaskan dalam undang undang no 6 tahun tahun 2014 tentang desa.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan

pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu di kembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Seorang kepala desa sebagai administrator , maka dalam perannya harus menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Desa Wayafli merupakan salah satu desa dari 10 Desa di Wilayah Kecamatan Maba kabupaten Halmahera Timur. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, karena berdasarkan apa yang dilihat di Desa Wayafli Kecamatan Maba, tingkat kreativitas dan daya saing masyarakat desa Wayafli dalam mengelola ekonominya masi sangat rendah, karna jika di lihat dari program program pemberdayaan msasyarakat yang ada di desa wayafli tela ter arah dan dan berjalan dengan baik, karena Berdasarkan masalah yang ada desa wayafli dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu kemiskinan struktural, dan sumber daya manusia yang rendah. adapun persoalan lain yaitu persoalan pendidikan yang lebih dipicu oleh rendahnya perekonomian masyarakat dan kesadaran akan pendidikan dari masyarakat. Upaya untuk menanggulangnya harus

menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Di samping itu desa Wayafli memiliki potensi dominan yang dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan kenyataan empiris yang dikemukakan pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Peran kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :Bagaimana Peran kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur”? Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk : “untuk mengetahui bagaimana peran kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur.

KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, M, 1998 : 286).

dalam Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peran Formal (Peran yang Nampak Jelas)
Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara

hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual.

2. Peran informal (peran tertutup)
Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.

Konsep Kepala Desa

Kepala desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 26 undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa memiliki kewenangan untuk :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Membina kehidupan masyarakat desa
5. Membina perekonomian desa.
6. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
7. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konsep Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (good Governance)

Sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993) bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi

pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut, (Sedarmayanti 2004:4).

Good dalam *good governance* mengandung dua pengertian yaitu : pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2003:6).

Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga di artikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah publik *governance*. *Governance* sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya di sebut pemerintahan yang baik atau *good governance* (Sedarmayanti, 2004:2).

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian (Tri Winarni, 1998: 75).

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi

kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. (Tri Winarni, 1998: 76).

Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah:

1. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.
2. Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri (Tri Winarni, 1998: 76).

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003: 43). Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan.

Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan Hempri, 2003: 44).

Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 82). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004: 83).

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah

merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisikmaterial.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004)

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. peneliti memilih informan yang berjumlah 7 orang yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, ketua BPD, ketua karang taruna desa wayafli, kaur pembangunan, dan 3 masyarakat desa wayafli kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur. Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pedoman Wawancara* yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh informan yang sudah ditentukan untuk

memperoleh informasi lebih mendalam.

Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut : Data Primer yang dikumpulkan, Data Sekunder di kumpulkan.

Adapun fokus penelitian ialah peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat yang khususnya di lihat dari bagaimana peran yang di lakukan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Wayafli Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Dan di lihat dari peran yang di lakukan kepala desa dalam cara untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat desa dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kepala desa merupakan individu yang menjadi pemimpin di desa, kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Pembangunan desa menjadi tanggung jawab kepala desa, sehingga keberhasilan suatu desa tergantung dari kepala desa tersebut. Salah satu cara membangun kesejahteraan masyarakat yang dapat merangkul nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima atau objek dan subjek manfaat dari proses mencari solusi dan meningkatkan kesejahteraan dari hasil pembangunan.

Di Desa Wayafli terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sebahagian besar berasal dari PNPM dan dari pihak swasta. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini mencakup pembangunan fisik desa dan pembangunan non-fisik yang menitik beratkan pada pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita.

Hal di atas senada dengan hasil wawancara saya dengan Kepala Desa Wayafli, yang mengatakan bahwa:

“Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan saluran irigasi. Sedangkan program pemberdayaan yang bersifat non-fisik antara lain pembinaan generasi muda, perbaikan gizi ibu hamil dan balita”.

Untuk pembangunan non fisik, khususnya pembinaan generasi muda merupakan program utama kepala desa yang menjadi visi dan misi kepala desa pada saat pencalonan sebagai kepala desa. Hal ini dikarenakan sekitar kurang lebih 37% penduduk Desa Wayafli berada pada usia 15-30 tahun, dengan mata pencaharian pokok adalah sebagai Nelayan, buruh bangunan, buruh tani, dan pekerjaan serabutan lainnya, dan terbilang banyak juga penduduk desa melakukan pernikahan dini dengan jumlah kepala keluarga yang cukup banyak. Hampir 70% penduduk Desa Wayafli bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Ini dikarenakan selain didukung oleh wilayahnya yang sebagian besar dari luas wilayah desa adalah lahan pertanian dan berdekatan dengan wilayah pantai. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa Wayafli, mengatakan bahwa:

“Hampir sebagian besar penduduk di desa ini bermata pencaharian utamanya adalah petani, nelayan, dan sebagian lagi sebagai buruh bangunan, buruh tani, atau serabutan , karena jika mengharapkan dari hasil pertanian dan hasil tangkapan ikan saja tidak cukup karena rendahnya harga jual komoditi pertanian di pasaran, ditambah lagi untuk mengharapkan hasil pertanian tahunan, dirasa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”.

Program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sumber pembiayaannya berasal dari Pemerintah Pusat melalui PNPM, baik itu yang bersifat pembangunan fisik maupun non fisik. Pemberdayaan masyarakat di desa ini meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, pembuatan drainase, pengerasan jalan (cor semen), pembuatan jalan tani, perbaikan saluran irigasi dan pemberdayaan masyarakat

non-fisik seperti perbaikan gizi ibu hamil dan balita serta pembinaan generasi muda.

Program pemberdayaan melalui pembinaan generasi muda di Desa Wayafli dilakukan dengan dua pendekatan, yakni berupa pendekatan dari sisi keagamaan dan pendekatan dari sisi ekonomi. Pendekatan dari sisi keagamaan dilakukan dengan cara melakukan kegiatan spiritual ibadah-ibadah di rumah ibadah. Memperingati hari-hari besar keagamaan, dan melakukan pembinaan bagi warga yang bermasalah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma dan kaidah, seperti melakukan tindak pidana, tindakan asusila, dan lain sebagainya. Pendekatan dari sisi ekonomi dilakukan dengan cara pemberian pinjaman modal bagi warga yang kurang mampu untuk dapat lebih mengembangkan usahanya, serta memberikan penyuluhan pertanian kepada petani muda di Desa Wayafli.

Simpan pinjam sangat membantu warga desa dalam mengembangkan usaha warga masyarakat yang ada di desa ini. Baik untuk mengembangkan usaha pertanian, maupun untuk berwiarswasta. Untuk mendapatkan pinjaman modal, warga desa harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Selain program simpan pinjam, program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa juga adalah pembinaan generasi muda yang ada di desa dengan memberikan penyuluhan tani maupun nelayan bagi warga desa. Penyuluhan ini diberikan oleh Dinas terkait melalui tenaga PPL (petugas penyuluh lapangan) yang ada di desa ini. Penyuluhan ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemajuan dalam penguasaan teknologi, meningkatkan kreatifitas petani dan nelayan mengenai potensi diri dan lingkungan, meningkatkan nilai usaha tambah, dan meningkatkan kemandirian.

Setiap musim baik itu musim tanam maupun melaut, gabungan kelompok usaha nelayan memberikan informasi, begitu pula ketika keadaan gelombang laut sedang tinggi, dimana keadaan berpotensi membahayakan keselamatan nelayan, hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh ketua karang taruna yang mengatakan bahwa:

“Gabungan kelompok usaha ini memiliki program-program kegiatan guna memberdayakan kelompok nelayan yang ada di Desa Wayafli. Mengingat besarnya potensi laut melalui tangkapan ikan yang dimiliki desa ini. Gabungan kelompok usaha juga selalu ikut serta dalam penyuluhan-penyuluhan yang diadakan oleh Dinas itu Dinas kelautan maupun Pertanian daerah kabupaten. Kita juga sering mengadakan diskusi terbuka dengan warga desa mengenai masalah yang dihadapi nelayan. Tak jarang kita juga mengundang penyuluh dari dinas kelautan dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi nelayan, untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih baik”.

Masalah penyaluran bantuan, yang disebabkan karena terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia. Terbatasnya alat-alat teknologi penangkap ikan seperti jala dan perahu, merupakan kendala-kendala nelayan yang menjadi persoalan bagi mata pencarian yang ada di Desa Wayafli. Hal ini senada diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Selama ini yang selalu menjadi masalah adalah penyaluran bantuan bagi nelayan itu masih terbatas dan masih tertinggalnya desa ini dalam hal teknologi penangkapan ikan”.

Sesuai dengan informasi yang diperoleh, ternyata pemberian bantuan kepada masyarakat desa masih terbatas pada anggaran yang diberikan melalui dinas terkait, sedangkan secara internal bantuan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberikan bantuan yang sumber anggarannya dari desa belum pernah dilakukan, hal ini secara gamblang memberikan penjelasan bahwa peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat khususnya nelayan yang program secara internal belum pernah dilakukan di Desa Wayafli, hal ini senada dengan penuturan kepala desa yang mengatakan bahwa:

“memang harus diakui bahwa pemberdayaan masyarakat yang sumber dananya berasal dari internal pemerintah desa belum pernah dilakukan, selama ini pemberdayaan masyarakat hanyalah sebatas pada bantuan-bantuan yang berasal dari pemerintah kabupaten melalui dinas-dinas terkait, mudah-mudahan di tahun 2017 dapat dibuat program

dari APBDesa untuk pemberdayaan masyarakat seperti pemberian bantuan yang dilakukan oleh dinas kabupaten”.

salah satu program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Wayafli adalah perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Perbaikan gizi ibu hamil dan balita menjadi salah satu program utama kepala desa dalam memberdayakan masyarakatnya. Karena generasi penerus adalah modal utama dalam pembangunan. Untuk mendapatkan generasi muda yang berkualitas maka perlu dipersiapkan sedini mungkin, sejak anak masih dalam kandungan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa, yang mengungkapkan bahwa: “Kesehatan ibu hamil sangatlah penting, gizi ibu hamil perlu diperhatikan agar kesehatan ibu dan anak tetap terjaga sejak masih dalam kandungan. Hal ini guna menekan angka kematian ibu dan anak, juga agar anak lahir dalam keadaan sempurna, tidak cacat dan mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu pemberian gizi dan nutrisi pada anak sangat perlu diperhatikan sejak anak dalam kandungan, hal ini perlu menjadi perhatian kami selaku pemerintah desa karena untuk peningkatan kuantitas masyarakat yang nantinya mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa Wayafli ini”.

Program ini juga bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Selain itu, program ini juga bermanfaat untuk memperbaiki gizi anak, agar anak-anak tidak rentan akan penyakit. Selain itu untuk memperkuat peran ibu dalam keluarga. Kegiatan perbaikan gizi ibu hamil dan anak dilakukan antara lain dengan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang dilakukan tiap dua kali dalam sebulan. Makanan tambahan yang dimaksud adalah bubur sehat bagi balita yang berumur 8 bulan hingga 3 tahun. Selain itu diberikan pula susu gratis bagi ibu hamil guna meningkatkan gizi pada ibu hamil. Penimbangan rutin juga dilakukan setiap dua kali dalam sebulan di posyandu yang ada di desa. Selain itu, pemberian penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan dilakukan hampir disetiap bulannya. Yang dilakukan di aula desa. Selain penyuluhan tentang pentingnya kebersihan,

penyuluhan tentang gizi dan makanan sehat juga sering diadakan. Penyuluhan ini diberikan oleh dinas kesehatan bekerjasama dengan bidan desa.

Kepala Desa Wayafli dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Wayafli memiliki peranan yang sangat sentral. Baik itu dalam pembangunan fisik desa maupun pembangunan non fisik yang ada. Kepala Desa berperan aktif dalam membangun desanya. Kepala desa senantiasa mengajak warganya bergotong royong dalam membangun desa. Bahkan tak jarang kepala desa terjun langsung mengawasi dan ikut dalam pembangunan fisik yang dilakukan di desanya.

Untuk pembangunan non fisik, khususnya meningkatkan swadaya masyarakat. Kepala desa senantiasa mengajak dan melakukan pembinaan kepada generasi muda. Kepala desa juga turut aktif dalam setiap kegiatan organisasi pemuda yang ada di desa ini. Seperti, kepala desa turut aktif dalam setiap rapat-rapat yang diadakan oleh kelompok usaha. Kepala desa selalu memberikan masukan dan saran serta pengarahan. Kepala desa juga selalu mengajak warganya untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan yang ada. Seperti penyuluhan-penyuluhan yaitu, penyuluhan kesehatan, juga kegiatan keagamaan lainnya. Kepala desa juga selalu memberikan pengarahan kepada warganya agar senantiasa memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Bahkan kepala desa juga turut aktif dalam gotong royong membersihkan lingkungan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Bapak Kepala Desa Wayafli benar-benar telah melakukan pemberdayaan masyarakat. Bahkan beliau dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di desanya. Sehingga masyarakat desa dapat memperoleh manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Diantara lain; meningkatkan pengetahuan dan pengembangan pertanian, meningkatkan kemandirian petani dan warga, meningkatkan perekonomian warga, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kepala desa dalam menyikapi ini bisa terbantu dengan bantuan

dana dari pemerintah. Kepala desa juga selalu bersikap transparan baik masalah pemberdayaan masyarakat maupun masalah bantuan yang didapatkan desa baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Hampir semua bantuan yang masuk ke desa selalu dirapatkan dengan warga. Begitu pula dengan dalam mengambil suatu kebijakan, kepala desa selalu melakukan koordinasi dengan anggotanya serta menerima setiap saran dan masukan.

Hal ini menunjukkan bahwa Desa Wayafli dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar peranan kepala desa dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, namun sayangnya program pemberdayaan yang dilakukan masih sebatas pada program yang inisiatifnya berasal dari pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, belum terdapat program pemberdayaan yang anggarannya berasal dari internal pemerintah desa itu sendiri.

1. Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Upaya Pembinaan

Salah satu wewenang kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat.

Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai terkikis untuk dibangkitkan

kembali. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik.

Pembinaan ini memiliki cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pemberdayaan masyarakat yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Dalam hubungannya dengan pembinaan, Talidzuhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam membina kehidupan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus diubah, yang melenceng atau menyalahi aturan harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

Sebagai pemimpin di Desa Wayafli, kepala desa membina kehidupan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara warganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagai desa swadaya yang penduduknya sebahagian besar adalah berprofesi sebagai seorang petani, kegiatan-kegiatan dalam pertanian pun dilakukan secara bergotong-royong. Misalnya dalam membangun saluran irigasi tersier, para warga khususnya pemuda melakukan secara bersama-sama. Salah satu kebiasaan yang ada di desa ini yaitu sebelum melakukan tanam padi, para warga selalu bergotong royong membasmi hama tikus. Bahkan kepala desa turut langsung bersama warganya turun ke sawah untuk membasmi hama tikus yang selalu merusak tanaman petani.

Hal ini senada diungkapkan oleh Ketua BPD yang mengatakan bahwa: "Hampir setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini selalu bergotong royong. Salah satu

contohnya saat membangun saluran air, para warga saling bergotong royong karena warga di sini juga kebanyakan adalah buruh bangunan, sehingga tidak perlu lagi membayar buruh untuk mengerjakan pembangunan di desa ini, kebanyakan pembangunan di desa ini semuanya dilakukan dengan bergotong-royong sehingga menghemat pengeluaran”.

Begitu pula diungkapkan oleh ketua karang taruna yang mengatakan bahwa: “Kepala desa selalu mengajak warganya untuk bergotong royong, baik itu membersihkan desa, saat membangun desa, bahkan saat para nelayan kembalipun kepala desa beserta warga desa di sini selalu bergotong royong untuk menarik hasil tangkapan ikan”.

Selain menanamkan kembali semangat gotong royong pada warganya, kepala desa juga melakukan pembinaan kehidupan masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Hal ini agar kehidupan masyarakat desa terhindar dari perbuatan asusila seperti miras, berjudi, merampok dan perbuatan-pebuatan lainnya yang melanggar norma dan kaidah. Kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dengan cara memperingati hari besar keagamaan. Selain itu, kepala desa juga membina kehidupan warganya tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan formal tapi juga melalui kegiatan-kegiatan non-formal. Kepala desa senantiasa mengajak warganya berdialog khususnya pemuda-pemuda desa, saling berbincang-bincang dan mengajak warganya untuk berbincang-bincang secara terbuka.

Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat penjelasan akan makna, dan maksud, tujuan, serta manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Sebab bagaimana pembangunan akan dilaksanakan, lebih banyak dimusyawarahkan dengan warga desa umumnya dan dengan tokoh masyarakat khususnya. Melalui pembinaan inilah dibangkitkan semangat kemauan serta ditumbuhkan jiwa membangun dalam diri warga desa agar lebih berdaya. Dalam membina kehidupan masyarakat, kepala desa menyatukan dirinya terhadap semua warga dimanapun dan dalam keadaan apapun dan tidak menciptakan sekat-sekat antara pemerintah dengan masyarakat.

Perekonomian desa sangatlah penting untuk dikelola dan dibina. Efektivitas pengelolaan keuangan desa merupakan tujuan dari Kepala Desa Wayafli. Pemasukan anggaran yang tidak stabil dan belum tergalinya sumber APB desa masyarakat Desa Wayafli serta belum adanya badan usaha milik desa merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Melalui ADD dan Dana Desa perekonomian desa sangat terbantu. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.

Hal senada diungkapkan oleh Kaur Pembangunan yakni;

“Salah satu pembangunan desa yang termasuk dalam APB desa dan didanai oleh Dana Desa dan ADD pada Tahun 2016 adalah pembangunan saluran air dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya banjir, karena seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dan Dana Desa atau alokasi dana desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat”.

Pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat pada pengelolaan keuangan desa dengan seefisien mungkin. Setiap tiga bulan sekali kepala desa rutin memeriksa buku administrasi keuangan desa dengan tujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan agar pengeluaran telah sesuai dengan yang ditetapkan anggaran desa yang kemudian melaporkannya pada BPD. Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Wayafli selain dengan mengembangkan potensi pertanian. Kepala desa juga membuka peluang swasta dalam mengembangkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa.

2. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Pembangunan

Disamping kemampuan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa

sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bila mana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. Hampir setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Wayafli dilaksanakan melalui musyawarah. Kepala desa selalu melakukan koordinasi dengan perangkat desanya dalam melakukan setiap kegiatan. Selain berkoordinasi dengan bawahannya, kepala desa juga selalu berkoordinasi dengan atasannya seperti camat dan pemerintah daerah.

Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adalah sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap pembangunan di desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Kepala desa mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif melalui organisasi yang ada di desa. Sehingga komunikasi antara aparat pemerintah denganarganya dapat terjalin melalui organisasi desa.

Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Partisipasi mendorong setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepala desa sendiri selalu mengajak warga masyarakatnya berdiskusi baik itu secara formal maupun non formal. Hal ini beliau lakukan agar merangsang masyarakat desa untuk turut aktif dalam proses pembangunan. Peranan pemerintah sendiri khususnya kepala desa adalah sebagai fasilitator dalam pembangunan. Kepala desa juga tidak pernah membeda-bedakan warganya. Sehingga tidak terjadi kecemburuan antar masyarakat yang akan mengakibatkan pada konflik sosial.

Pembahasan

Secara umum pendekatan adalah suatu teknik dan cara yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Teknik dan cara tersebut dan harus diikuti oleh semua pihak dalam suatu pekerjaan karena berkenaan dengan sistem dan prosedur yang telah disepakati bersama. Pendekatan berkenaan pula dengan implementasi penetapan tujuan, sistem dan pengembangan sebuah pekerjaan, pendekatan yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat terbagi atas: a) pendekatan partisipatif, b) pendekatan kesejahteraan dan c) pendekatan pembangunan berkelanjutan. Guna kejelasan masing-masing pendekatan tersebut peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif berorientasi pada pendekatan dalam memberdayakan masyarakat secara aktif dalam berpartisipasi secara sadar dalam mengembangkan mengupayakan diri secara sadar sehingga dapat memenuhi kebutuhannya melalui pengetahuan dan keterampilan. Sesuai dengan hasil penelitian kepala desa Wayafli pada prinsipnya telah menggunakan perannya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, seperti pada hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa menggerakkan partisipasi warga untuk dapat bergotong royong melaksanakan pekerjaan pembangunan, hal ini memungkinkan mengingat warga desa Wayafli sebagian besar memiliki keahlian sebagai pekerja bangunan sehingga tidak diperlukan biaya tambahan untuk biaya jasa tukang, masyarakat desa pula turut antusias membantu pekerjaan pembangunan tersebut.

b. Pendekatan Kesejahteraan

Pendekatan kesejahteraan merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan berbagai upaya yang dilakukan difokuskan dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pendekatan ini masyarakat menjadi indikator utama dalam pemberdayaan. Sesuai dengan hasil penelitian pemberdayaan masyarakat berdasarkan pendekatan kesejahteraan ini masih dapat dikategorikan relatif, karena tidak semua masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan seperti pemberian bantuan untuk nelayan tidak seratus persen meningkat kesejahterannya, berdasarkan hasil wawancara hal ini lebih disebabkan oleh kecakapan dan faktor individu masyarakat itu sendiri, seperti ada beberapa masyarakat desa berdasarkan hasil observasi peneliti kurang memiliki etos kerja untuk dapat meningkatkan kesejahterannya seperti menunda-nunda waktu untuk melaut, sehingga dapat diasumsikan bahwa dalam pendekatan kesejahteraan melalui pemberdayaan belum sepenuhnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

c. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan.

Pendekatan ini berorientasi pada program-program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pendekatan pemberdayaan tersebut tergantung pada program yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian pendekatan ini sudah dapat diterapkan secara khusus di desa Wayafli, namun belum dapat berkesinambungan, karena program pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, walaupun sumber pembiayaan berasal dari partisipasi masyarakat, namun tidak dapat mencukupi sampai rampung pembangunan tersebut, oleh karena itu dibutuhkan anggaran dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah kabupaten.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti berpendapat bahwa setiap aparat pemerintah baik aparat pemerintah pusat maupun daerah memiliki strategi dalam mengimplementasikan bentuk pemberdayaan masyarakat. Pendekatan-pendekatan pemberdayaan tidak terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan taraf

hidup masyarakat sesuai yang diharapkan yaitu kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penentu keberhasilan peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wayafli yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Keturunan bagi masyarakat desa merupakan hal yang perlu diperhatikan jika hendak melaksanakan perannya sebagai seorang kepala desa, karena di dalam masyarakat desa masih terdapat sekelompok masyarakat yang senantiasa mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang masih sangat kental hal ini turut terjadi di Desa Wayafli, keturunan yang dimaksud di sini adalah karena nenek moyangnya, orang tuanya, bahkan keluarganya pada zaman dahulu memiliki posisi dan fungsi tertentu dalam masyarakat sehingga ia memperoleh pengakuan masyarakat akan keberadaannya dalam masyarakat secara turun temurun walaupun telah terjadi pergeseran nilai-nilai tapi dikalangan masyarakat desa masih diakui sebagai tokoh, sebagai panutan yang mempunyai pengaruh secara kharismatik. Masyarakat di Desa Wayafli sendiri masih menjunjung tinggi nilai dan norma-norma yang sifatnya turun temurun yang ada dalam masyarakat. Walaupun masyarakat desa sudah mengalami pergeseran budaya dan kultur, namun ada nilai-nilai dan norma-norma tertentu yang masih sangat dijaga oleh warga desa yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat sendiri. Oleh karena itu, dalam menjalankan perannya sebagai seorang kepala desa dalam kehidupan sehari-hari maka faktor keturunan sangat diperhatikan.

Untuk menopang kedudukannya sebagai pemimpin, maka kepala desa haruslah memiliki wibawa baik terhadap bawahannya maupun di mata masyarakatnya. Namun bukan berarti kewibawaan harus membatasi diri terhadap masyarakat, tetapi bagaimana memberi pandangan kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia harus memiliki wibawa kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia harus memiliki wibawa. Kewibawaan dapat diartikan sebagai kekuatan yang memancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga

mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya. Kepala desa dalam mengambil sebuah kebijakan, beliau juga melihat dari berbagai aspek kehidupan dan sudut pandang sehingga keputusan yang dia ambil pun bijaksana demi terwujudnya tujuan bersama maka secara tidak langsung kewibawaan tersebut akan terpancar dalam diri seorang pemimpin tersebut. Tidak hanya dalam mengambil keputusan kewibawaan seorang pemimpin dapat terlihat, tetapi dapat juga bagaimana seorang pemimpin dapat mengendalikan dirinya terutama dalam mengendalikan emosinya dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, apabila seorang pemimpin dapat melalui suatu proses dari mengendalikan diri sendiri hingga dapat mengendalikan orang lain demi terwujudnya suatu keputusan bersama maka bisa dikatakan pemimpin tersebut telah menggunakan kekuasaannya dengan baik dan dia memiliki suatu kewibawaan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap orang yang dipimpin.

Hal yang selanjutnya sebagai faktor penentu keberhasilan peranan kepala desa adalah kekuasaan yaitu kekuatan, legalitas, dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Tanpa kekuasaan bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya karena hanya dengan kewenanganlah seseorang berhak memerintah orang lain. Beberapa hal dalam kekuasaan yakni: kekuasaan menghargai, yaitu kekuasaan yang diperoleh dari fakta bahwa seseorang dikenal sebagai pemberi pengaruh, mempunyai kemampuan untuk memberi imbalan orang lain, dikenal sebagai orang yang dipengaruhi, untuk melaksanakan perintah, yang mungkin dinyatakan atau tersirat, kekuasaan sah atau kekuasaan formal adalah kekuasaan yang ada ketika seorang bawahan atau orang yang dipengaruhi mengakui bahwa pemberi pengaruh "berhak" atau secara hukum boleh menggunakan pengaruh dalam kaitan tertentu, kekuasaan keahlian adalah berdasarkan pada keyakinan atau pengertian bahwa pemberi pengaruh mempunyai pengetahuan spesifik atau kepekaan relevan yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi, dan kekuasaan

rujukan adalah kekuasaan berdasarkan pada keinginan dari orang yang mempengaruhi untuk menjadi seperti atau menyamakan dirinya dengan pemberi pengaruh.

Sedangkan yang menjadi penghambat dari keberhasilan kepala desa dalam melakukan pemberdayaan adalah sebagai pemimpin masyarakat maka sudah selayaknya apabila seseorang kepala desa mengetahui kondisi atau keadaan masyarakat yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab bila pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Kepala Desa Wayafli dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa program pemberdayaan yang ada di desa yaitu pemberdayaan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur: saluran air, jalan setapak, pemberian bantuan alat-alat penangkap ikan nelayan, sedangkan pemberdayaan secara non fisik meliputi penyuluhan-penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan mata pencahariannya yang sebagian besar sebagai nelayan, pembinaan generasi muda dan peningkatan gizi anak balita dan ibu hamil.
2. Dari sekian banyak program pemberdayaan masyarakat baik secara fisik dan non fisik yang ada di Desa Wayafli, sebagian besar masih menjadi program pemerintah Kecamatan Maba dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, seperti program penyuluhan dan pemberian bantuan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, peningkatan gizi ibu hamil oleh dinas kesehatan melalui Puskesmas/Pustu yang ada di desa, dan PNPM yang menjadi program nasional, dimana anggarannya

bukan berasal dari pemerintah desa, sedangkan program pemberdayaan yang berasal dari internal pemerintah desa hanyalah sebatas pada kegiatan pembangunan saluran air, jalan setapak, dan pembinaan generasi muda dimana anggaran yang dibutuhkan berasal dari APB Desa yang bersumber dari ADD dan Dana Desa.

3. Masih rendahnya pendidikan yang ada di masyarakat desa wayafli karna lemahnya ekonomi dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya yang kebanyakan hanya tamatan SMP

Saran

1. Peningkatan peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial terlebih dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Peran kepala desa dalam melakukan pemberdayaan perlu ditingkatkan inisiatif yang berasal internal pemerintah desa itu sendiri seperti menjadi program pemerintah desa, tidak sebatas pada kerja sama dengan pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, agar tujuan pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif dan berlangsung secara terus menerus, tanpa terhenti karena menunggu anggaran dari pemerintah kabupaten.
3. Peningkatan peran yang perlu di optimalkan lagi mengenai sumber daya manusianya yang di lihat dari tingkat pendidikan masyarakat desa wayafli yang masi d bawa rata rata,itu sebabnya perlu adanya pendekatan secara langsung dan juga adanya sosialisasi tentang pendidikan dan bantuan yang langsung di berikan oleh pemerintah desa khususnya yang duduk di bangku SMA agar masyarakat yang ada bisa mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karna itu juga menjadi penunjang peran dari seorang kepala desa dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dari suatu desa.